

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalahnya kemiskinan sama tuanya dengan manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia (Nunung, 2008). Kemiskinan ini disebabkan banyak hal yang salah satunya adalah keterbatasannya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang tertentu lantaran pendidikan yang kurang maksimal serta mempengaruhi mentalitas masyarakatnya, sehingga manusianya tak mampu memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Kemiskinan pada umumnya dikatakan sebagai keadaan dimana terjadi ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Terlebih lagi berbagai kenaikan harga bahan kebutuhan masyarakat makin mencekik rakyat kecil dari awal 2017 mulai melambung, kenaikan harga, mulai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, tarif listrik, biaya mengurus surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), hingga harga cabai. Semua datang bertubi-tubi. Di sisi lain, pendapatan masyarakat secara riil tak menunjukkan kenaikan berarti. Beban yang dipikul masyarakat pun terasa kian berat(Prasetyo E Suryo, 2017). Hingga baru-baru ini kelangkaan bahan dapur yakni garam sangat benar-benar membuat ibu pertiwi menangis, dengan jumlah pantai dan lautan yang luas ibu pertiwi kekurangan garam hingga perlu inport dari negeri tetangga.

Berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, contoh; bantuan tunai langsung (BLT), Beras Miskin, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh program Jamkesmas, program Inpres Desa

Tertinggal (IDT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, tetap saja kita dapat dengan mudah menemukan fenomena kemiskinan di Indonesia, kebijakan itu pula tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di Indonesia. Negara memang wajib menyediakan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945 (Isriawaty S Fheriyah, 2015:1).

Kemiskinan bukanlah hal baru yang terjadi di Negara Indonesia, bahkan disetiap Negara lain sekalipun. Dampak-dampak tersebut bisa terjadi bukan hanya dari masing-masing masyarakatnya saja, namun kemiskinan juga dapat terjadi akibat pengaturan sistem pemerintahannya yang tidak benar. Menurut Suparlan (2004:315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Salah satu contoh hal yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah keterbatasannya lapangan kerja untuk masyarakat dan kurangnya kualitas SDM yang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan di setiap Negara. Dan akibatnya banyaknya pengangguran yang tidak bisa bekerja lantaran minimnya kemampuan untuk bekerja terlebih lagi ditambah sarjana yang tiap

tahun selalu bermunculan dari universitas yang ada, hal ini justru menjadi masalah karena lapangan kerja lebih sedikit dari pada pencari kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah. Adapun terjadinya kemiskinan dibagi menjadi empat diantaranya:

1. Individu: adalah yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain.

2. Geografis: adalah kemiskinan yang disebabkan oleh masalah alam; misalnya kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah para penduduk sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya masing-masing.

3. Kultural: adalah kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, terlalu bergantung pada harta warisan, dan lain-lain.

4. Struktural: adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan system pemerintahan suatu Negara. Bentuk kemiskinan di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh orang tua saja, bahkan anak-anak yang masih dibawah umur pun yang seharusnya mereka belum harus memikirkan masalah perekonomian di suatu bangsa justru mau tidak mau harus turut ikut campur dalam hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu banyak anak kecil yang masih dibawah umur harus mencari nafkah dijalanan dengan cara mengamen atau meminta-minta dan lain sebagainya untuk bisa menambahi kebutuhan keluarga mereka, sehingga karena terlalu seringnya mereka melakukan hal tersebut dijalanan mereka sampai-sampai harus rela kehilangan masa depannya dengan cara berhenti bersekolah karena keadaan perekonomian yang begitu sulit dihadapinya (Suyawati Criswardani, 2005:122).

Koruptor juga berperan besar dalam meningkatkan kemiskinan di indonesia, korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh. Banyak sekali kasus korupsi yang menggelapkan uang negara dengan nominal yang terbilang cukup besar, korupsi membuat suatu negara menjadi miskin dan akan berlanjut tidak dapat

berkembang kemudian lambat laun akan jatuh, tindakan korupsi ini menyebabkan banyak investor jadi tidak percaya, bisnis membutuhkan biaya tinggi sedangkan produktifitas menurun, kebutuhan meningkat yang kemudian hutang menjadi solusi ketika hutang menumpuk negara akan mengalami kejatuhan, untuk itulah korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Walaupun berganti-ganti sosok pemimpin di Indonesia, tidak banyak hal berarti yang dapat mereka lakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi saat ini. Namun pemerintah terus berusaha dan memperbaharui sistem kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan yang sudah berjalan dari masa ke masa, pada pemerintahan Jokowi BLT ditiadakan kemudian digantikan dengan Program Keluarga Harapan, yang awalnya bantuan dana BLT atau Bantuan Langsung tunai sebuah bantuan sosial yang bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya (Marini Dian, 2015:45). Kemudian PKH muncul sebagai program lanjutan dari BLT, program bantuan lainnya juga muncul seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM) walau berbeda objeknya namun tetap dalam ranah bantuan dana kemiskinan namun ditujukan pada anak keluarga miskin yang mempunyai kendala untuk sekolah, dan untuk bantuan lain di pendidikan tetap berlanjut seperti Bantuan Operasional Sekolah yakni program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu ada pula bantuan Beras Miskin atau Raskin, Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program ini ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Segala program tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K) yang melanjutkan program dengan program keluarga harapan yang memang ditujukan kepada rumah tangga sangat miskin.

PKH atau Program Keluarga Harapan sendiri mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 hingga saat ini. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperiukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Bantuan dana PKH yang diberikan berorientasi kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua RTSM bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga dengan syarat tertentu yang mendapat hak menjadi anggota pkh sesuai dengan syarat yang di berikan meski realitanya ada juga yang tak sesuai dengan aturan pkh(Yudid B.S Tlonaen, dkk, 2014).

Program perlindungan sosial ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Dalam jangka pendek PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Sementara secara khusus, tujuan PKH adalah:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH;
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan peserta;
- 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, menyusui dan memiliki anak usia di bawah 5 tahun dan anak pra sekolah anggota keluarga sangat miskin.
- 4) Meningkatkan meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta PKH

(Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keuangan, 2015).

Penyalurannya empat kali dalam satu tahun. Penyaluran pertama sebesar Rp 500.000, kedua Rp 500.000, ketiga Rp 500.000, dan keempat Rp 250.000 secara non-tunai atau melalui ATM (pkh.kemsos.go.id, 2018). Pemerintah berharap dengan adanya sistem non-tunai masyarakat dapat menabung dan mengenal teknologi atm, di samping itu juga meminimalisir pemotongan dana bantuan dari pihak-pihak yang nakal. Adanya pihak-pihak nakal seperti itu biasanya muncul di daerah pedesaan dan minim pendidikan seperti daerah-daerah desa. Namun ada hal yang lebih penting yang kurang diperhatikan yaitu pengawasan dan pendataan calon penerima bantuan PKH terutama di daerah pedesaan yang salah satunya di desa Jrengik kabupaten Sampang.

Program keluarga harapan menurut Muhamad Rafiudin dalam penelitiannya mengenai implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Wanassalam Kabupaten Lebak pada tahun 2016 lalu, dalam penelitiannya dikemukakan bahwa Mengenai pengetahuan dan sosialisasi Program PKH yang dilakukan oleh Petugas/pendamping di PKH Kecamatan Wanasalam, hanya dilakukan antara penerima program PKH dan Petugasnya saja. Sementara, sosialisasi yang dilakukan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat luas tidak dilakukan dengan baik. Dengan pejabat kecamatan dan pejabat RT juga tidak dilakukan dengan baik. Sehingga *stakeholders* pendukung program PKH belum mendukung sepenuhnya. Jadi memang ada kekurangan dalam hal sosialisasi pada masyarakat sehingga ketika masyarakat mendapat sesuatu masalah misalkan ketidak tepatan sasaran penerima pkh yakni keluarga yang lebih layak mendapatkan bantuan justru tak mendapatkan bantuan. Hal ini juga akan berpengaruh dalam penggunaan dana bantuan tersebut jelas akan berbeda dengan tujuan yang di harapkan oleh lembaga pemerintah. Mendengar pernyataan Menteri sosial Khofifah Indar Parawansa tentang PKH berharap jangan ada bansos yang dipotong, jangan ada bansos yang tidak tepat sasaran, ini cara kita menjaga dan mengawal bagaimana bansos itu tepat sasaran, tegasnya, di Sampang tepatnya di Jrengik sudah berjalan PKH beberapa tahun, Jrengik sendiri merupakan salah satu desa yang memiliki penduduk yang bekerja sebagai petani, pengusaha, dan pegawai yang menurut

peneliti merupakan kawasan yang tak banyak RTSM lantaran sudah jarang dijumpai keluarga sangat miskin ini karena rumah-rumah rata-rata bertembok dan para petani pun sudah rata-rata memiliki lahan bercocok tanam dan hewan ternak dan anak-anaknya yang bekerja di luar negeri sebagai TKI, berdasarkan observasi yang peneliti temui, masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH tak selalu dari kalangan RTSM, padahal syarat mendapatkan bantuan ini Keluarga tersebut dinyatakan KSM oleh DINSOS dan juga memiliki syarat-syarat lainnya, tentu hal ini ada sesuatu yang tidak benar dalam PKH di Jrengik, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Pendistribusian Bantuan Program Keluarga Harapan (Studi kasus pada Masyarakat di Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang).**

1.2 Rumusan masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

Bagaimana pendistribusian bantuan PKH? (Studi kasus pada Masyarakat di Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah,
Untuk mengetahui pendistribusian bantuan PKH (Studi kasus pada Masyarakat di Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang)

1.4 Manfaat penelitian

Diharapkan menjadi bahan acuan untuk :

- a. Akademis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai salah satu kebijakan publik, penelitian ini juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemda dan dinsos untuk meningkatkan serta mengevaluasi PKH agar lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Jrengik dan juga desa lainnya.
- c. Peneliti, sebagai salah satu syarat kelulusan menjadi sarjana sosiolog.